

ABSTRAK

Kiki Puspita Sari, NIM H0A113013, Program Studi Manajemen Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di Kabupaten Sarolangun. Di bawah bimbingan Haryadi SH,M,H sebagai pembimbing I dan Dr. Tona Aurora Lubis SE,MM sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Sarolangun. Serta, untuk mengetahui kendala pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Sarolangun.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknis penelitian lapangan, library research dan penelusuran data online. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata) dalam mengelola sektor pariwisata adalah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Sarolangun. Kendala dalam pengelolaan potensi pariwisata yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya peran aktif dari masyarakat, serta anggaran sektor pariwisata yang terbatas.

Kata kunci : Peran Pemerintah, Pengelolaan Potensi Pariwisata

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Sarolangun memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan lindung, hutan adat, hutan konversi dan taman nasional serta kaya akan bahan galian tambang yang belum seluruhnya dapat dieksploitasi dan dimanfaatkan secara optimal seperti batu bara, semen di bukit bulan, emas di batang asai, minyak bumi (fossil) di kecamatan Cermin Nan Gedang dan potensi lainnya.

Kabupaten Sarolangun juga memiliki objek wisata yang umumnya adalah objek wisata alam, selain itu juga wisata ziarah dan rohani, wisata minat khusus, wisata budaya dan wisata sejarah serta berbagai atraksi kesenian daerah yang

sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Sebagian kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun terdapat objek wisata yang menunggu pembenahan, Potensi pariwisata Kabupaten Sarolangun sangat beragam dan menjanjikan, mulai dari wisata alam hingga wisata budaya dan sejarah.

Meskipun Sarolangun memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di Sarolangun dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis mengangkat judul “**Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Sarolangun**”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi pariwisata di Kabupaten Sarolangun dan mengetahui kendala pemerintah daerah dalam mengelola potensi pariwisata di Kabupaten Sarolangun.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah Dan dewan prakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan asas pembnantu dengan prinsip otonom seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengelolaan

pengelolaan (*management*) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.

3. Pariwisata Dan Kepariwisataan

a. potensi pariwisata

Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

b. pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

c. kepariwisataan

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

C. METODE PENELITIAN

metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara deskriptif. Metode analisis kualitatif dilakukan karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui data-data statistik, sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya.

1. Sumber Data

- a. Data *primer* adalah data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti, dengan memaknai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara). Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari

pemerintah daerah yang terdiri dari Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, kepala bidang Objek dan daya tarik wisata, staf Bidang Objek dan Daya tarik Wisata, dan masyarakat Kabupaten Sarolangun,

- b. Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi dan diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta *literature* lainnya yang relevan dalam melengkapi data *primer* penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Penelitian Lapangan, dengan cara wawancara/*interview* dengan orang-orang yang berhubungan dengan bidang yang diteliti.
- b. *Library research*, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Penelusuran data *online* atau dengan menggunakan fasilitas internet.

3. Teknik Analisis Data

- a. Reduksi data Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan
- b. Sajian data Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan
- c. Pengambilan kesimpulan Data yang sudah diperoleh tersebut dicari maknanya dengan cara mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagainya. Data yang didapat peneliti mencoba mengambil kesimpulan.

D. GAMBARAN UMUM OBJEK

1. Visi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Terciptanya Sarolangun yang berbudaya dinamis sebagai daerah pariwisata mempesona dengan generasi muda yang berfisik dan bermental

sehat, kreatif, produktif, dan memiliki semangat patriotisme serta sportivitas yang tinggi.

2. Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
 - a. Meningkatkan pelayanan public melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik.
 - b. Meningkatkan, mengembangkan, melestarikan, dan mempromosikan kebudayaan daerah tradisional di kabupaten sarolangun.
 - c. Mengembangkan aksesibilitas sarana dan prasarana penunjang wisata.
 - d. Meningkatkan kreativitas dan penyaluran bakat-bakat yang dimiliki generasi muda yang meliputi lembaga kepemudaan, kegiatan para siswadan mahasiswadi kabupaten sarolangun.
 - e. Membangun motivasi keolahragaan untuk meraih prestasi yang dapat dibanggakan masyarakat dengan tekad agar tetap menang unggul dengan memperhatikan sportivitas yang tinggi.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja lembaga teknis Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 24 Tahun 2008, Dinas Kebudayaan, Pariwisata sebagai SKPD yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata, pengelolaan ketatausahaan Dinas, pelaksanaan tugas lain di bidang kebudayaan, pariwisata yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan Olahraga merumuskan Visi,

“Terciptanya Sarolangun yang berbudaya dinamis sebagai daerah pariwisata mempesona dengan generasi muda yang berfisik dan bermental sehat, kreatif, produktif, dan memiliki semangat patriotisme serta sportivitas yang tinggi”

Dalam mengimplementasikan visi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan, akuntabel dan mengutamakan kepentingan masyarakat, yang mempunyai misi sebagai berikut adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan public melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik.
- b. Meningkatkan, mengembangkan, melestarikan, dan mempromosikan kebudayaan daerah tradisional di kabupaten sarolangun.
- c. Mengembangkan aksesibilitas sarana dan prasarana penunjang wisata.
- d. Meningkatkan kreativitas dan penyaluran bakat-bakat yang dimiliki generasi muda yang meliputi lembagakepemudaan, kegiatan para siswadan mahasiswadi kabupaten sarolangun.
- e. Membangun motivasi keolahragaan untuk meraih prestasi yang dapat di banggakan masyarakat dengan tekad agar tetap menang unggul dengan memperhatikan sportivitas yang tinggi.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olahraga mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mengelola potensi pariwisata seperti yang diungkapkan oleh bapak Drs. Sutaryo selaku sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan Olahraga bahwa :

“sekarang ini dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga (Disbudparpora) mengeluarkan kebijakan seperti : Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sebagai fasilitator dan regulator pengelolaan pariwisata. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan aparatur dinas kebudayaan dan pariwisata ini dengan diadakannya forum rapat tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Kemudian Pemerintah merespon untuk memajukan pariwisata yang ada di kabupaten sarolangun, itulah kebijakan yang kami lakukan dalam mengelola potensi pariwisata di kabupaten sarolangun ini”

Hal serupa diungkapkan oleh bapak H. Firdaus SE. selaku Kepala Bidang Objek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yang menyatakan bahwa :

“Kebijakan yang ingin kami lakukan Melaksanakan kerjasama kebudayaan dan pariwisata antar daerah dan dunia usaha. Kerjasama yang dilakukan oleh Sarolangun adalah untuk memperkenalkan kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata/ODTW dan pelestarian budaya”

Mengelola pariwisata merupakan wujud kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan investor. Jika daerah sukses mengembangkan pengelolaan wisata yang kreatif, maka dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya pemasukan daerah yang bertambah, namun juga tingkat pengangguran dapat diminimalisir

Tiga pilar dalam pembangunan saat ini adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pelibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan sektor potensial di daerah perlu mendapat dukungan. Hal ini dikarenakan keterbatasan baik sumber daya manusia maupun biaya yang dimiliki oleh pemerintah.

Pariwisata sebagai salah satu urusan pilihan daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam pengelolaannya. Adapun pihak di luar dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten sarolangun yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata yaitu masyarakat sekitar lokasi wisata yang diberdayakan sebagai tour gued bagi wisatawan atau petugas penjaga kawasan wisata yang saat ini sudah dipihak keduakan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata memang sudah ada namun belum mencangkup ke seluruh objek wisata Sarolangun. Hal ini mendapat pembenaran dari bapak H. Firdaus SE selaku kepala bidang objek dan daya tarik wisata (ODTW) Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten sarolangun bahwa :

“Dinas Kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam anggaran untuk biaya pengelolaan pada

cagar budaya dan wisata budaya di kabupaten sarolangun yang disebut DAK pariwisata, saat ini pihak disbudparpora belum mengadakan kerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangan kepariwisataan sarolangun. Namun disbudparpora terus berusaha melakukan yang terbaik untuk pengelolaan potensi pariwisata di kabupaten sarolangun”

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap kondisi objek wisata yang ada di kabupaten sarolangun, sebagian besar masih dikelola sendiri oleh pemerintah kota dalam hal ini dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. Belum ada kesempatan bekerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan kepariwisataan sarolangun, namun ada beberapa objek wisata yang turut melibatkan masyarakat sekitar objek wisata sebagai pembantu pemerintah dalam pelestarian wisata dan lingkungan sekitar.

Setiap tahap dalam elemen pariwisata memerlukan Sumber Daya Manusia yang handal dan berkompeten untuk mengelola dan mengembangkannya, dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan disbudparpora untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya di bidang pariwisata seperti yang telah di ungkapkan oleh bapak Ebizal AMD selaku Staf di Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga bahwa :

“Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari produk kebudayaan dan pariwisata yang beragam, sesuai dengan identitas daerah. Penyiapan sumber daya manusia tidak hanya bagi aparatur pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan generasi muda, tetapi penting pula dipersiapkan berbagai penyuluhan mengenai pariwisata (peluang dan dampaknya) bagi masyarakat awam. Salah satu kebijakan yang sudah mulai dijalankan di bidang pengembangan SDM ini adalah pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan di daerahnya. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga juga berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan kemampuan komunikasi khususnya SDM yang berhadapan langsung dengan wisatawan”

Loyalitas dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Sarolangun baik secara langsung ataupun tidak langsung juga turut

membantu peranan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan potensi pariwisata di kabupaten sarolangun.

Kabupaten sarolangun memiliki berbagai macam objek wisata alam dan wisata budaya yang cukup banyak namun tidak semua objek wisata akan langsung dikelola oleh pemerintah daerah. Kepala Bidang objek dan daya tarik wisata dinas kebudayaan pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten sarolangun menyatakan bahwa :

“objek wisata yang membutuhkan pengelolaan di kabupaten sarolangun begitu banyak namun jenis potensi wisata yang telah di prioritaskan dan telah direncanakan dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga untuk segera dikelola adalah Goa Calow petak dan dermaga wisata tepian cik minah”

2. Kendala pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Sarolangun

Pengelolaan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berencana, dan melibatkan berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana dengan baik. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tidak akan terlepas dari kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya. Adapun kendala dalam kegiatan pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana pariwisata di objek-objek pariwisata yang kurang memadai.

Ketersediaan sarana dan prasarana di objek wisata menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal pengembangan sektor pariwisata suatu daerah karena sarana dan prasarana menjadi suatu hal penunjang bagi suatu objek wisata. Sekretaris dinas kebudayaan pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten sarolangun bapak Drs. Sutaryo menyatakan bahwa :

“Faktor penghambat atau kendala yang paling utama dalam pengelolaan potensi pariwisata adalah sarana dan prasarana terutama infrastruktur jalan. Karena lokasi pariwisata yang ada di sarolangun jauh dari jangkauan

ibukota jadi infrastruktur jalan lah kendala utama dalam pengelolaan potensi pariwisata”

Hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana terutama infrastruktur jalan belum baik, masih diperlukan suatu upaya untuk membangun/memperbaiki infrastruktur jalan agar dalam pengelolaan potensi pariwisata bisa terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.

b. Kurangnya peran aktif dari masyarakat sekitar

Salah satu yang menjadi kendala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga dalam pengelolaan potensi pariwisata di kabupaten sarolangun adalah kurangnya peran aktif dari masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Firdaus selaku kepala bidang objek wisata dan daya tarik dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten sarolangun yang menyatakan bahwa :

“Dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata daerah di kabupaten sarolangun sangat penting dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sekitar. Karena secara tidak langsung upaya pengembangan pariwisata daerah akan berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar itu sendiri“

Dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pariwisata yang ada di kabupaten sarolangun kurang baik, karena tanpa adanya peran aktif dari masyarakat sekitar pengelolaan potensi pariwisata tidak akan berjalan dengan sempurna.

c. Anggaran Sektor Pariwisata yang terbatas

Dana yang memadai merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi guna melakukan pembangunan. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sektor pariwisata merupakan suatu program pembangunan yang

membutuhkan dana yang sangat besar, terutama didalam pembangunan objek wisata serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

Pengelolaan pariwisata diindonesia termasuk kabupaten sarolangun, masih sangat bergantung dengan ketersediaan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sementara anggaran yang diberikan tidak seutuhnya diperuntukan untuk pengembangan wisata sendiri. Ada kegiatan atau kebutuhan lain di Disbudparpora yang juga sangat bergantung dari anggaran tersebut.

Sekretaris dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten sarolangun bapak Drs. Sutaryo menyatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan potensi pariwisata terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, faktor penghambat dalam pengelolaan potensi pariwisata di kabupaten sarolangun adanya keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan APBD pemerintah daerah karena tidak semua anggaran digunakan untuk keperluan kepariwisataan, banyak kegiatan lain Disbudparpora yang juga membutuhkan biaya”

Hal serupa diungkapkan bapak Ebizal. AMD selaku staf bidang objek dan daya tarik wisata dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten sarolangun menyatakan bahwa :

“Faktor yang mempengaruhi tidak lancarnya pembangunan pariwisata di kabupaten sarolangun adalah keterbatasan dana. Sektor pariwisata merupakan sektor pilihan bukan sektor yang wajib didahului oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah Kabupaten sarolangun juga mengupayakan secara maksimal dalam anggaran di bidang pariwisata karena pariwisata daerah merupakan asset yang dimiliki dan bias menambah pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Sarolangun sendiri“

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Sarolangun keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat berpengaruh dalam pengembangan sektor kepariwisataan daerah. Jika anggaran tidak ada dapat menghambat jalannya

program-program yang telah disusun oleh dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian ini, yakni :

- a. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Sarolangun. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah melakukan berbagai upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur, melakukan kerja sama kebudayaan dan pariwisata antar daerah dan dunia usaha, serta kebijakan yang inisiatif pemerintah lakukan melaksanakan kerjasama kebudayaan dan pariwisata antar daerah dan dunia usaha.
- b. Kendala dalam pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Sarolangun yang di hadapi dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga adalah sarana dan prasarana pariwisata di objek-objek pariwisata yang kurang memadai, kurangnya peran aktif dari masyarakat sekitar serta anggaran sektor pariwisata yang terbatas.

2. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah sebaiknya merespon meningkatnya minat wisatawan yang mengunjungi objek wisata di kabupaten sarolangun, dengan perlahan melakukan perbaikan fasilitas pendukung pariwisata seperti perbaikan akses jalan menuju objek wisata, membuat informasi pariwisata yang dapat dengan mudah di akses oleh para wisatawan.
- b. Untuk memperlancar kegiatan pengelolaan potensi pariwisata, menyangkut terbatasnya anggaran sebaiknya selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga bias mengajukan proposal bantuan pada anggaran pendapatan dan

belanja daerah dan kementerian pariwisata RI, bekerja sama dengan pihak swasta yang merupakan pihak investor untuk pembangunan dan pengembangan objek wisata daerah sehingga kepariwisataan kabupaten sarolangun bisa berhasil dengan maksimal serta berjalan dengan baik dan lancar

- c. Dalam pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Sarolangun pemerintah daerah perlu membimbing masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi, agar masyarakat ikut berperan membangun, mengembangkan dan melindungi potensi pariwisata di kabupaten sarolangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat statistik (BPS), *Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2016*, Indonesia, 2016.
- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun. *Pesona Pariwisata Sarolangun*. Sarolangun, 2016.
- Fauziah, Ami. *Peranan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dalam Mempromosikan Objek Pariwisata Di Kabupaten Sarolangun*. Universitas Jambi, Jambi, 2016.
- Harun, Rochajat. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Herlambang, susatyo. *Pengantar manajemen cara mudah memahami ilmu manajemen*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Kanuna, Risky Sirupang. *Peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara*. Universitas hasanuddin, Makasar, 2014.
- Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepariwisataan*. UU Nomor 10 Tahun 2009.

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja lembaga teknis Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun.

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 24 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan Olahraga.